



DIY Siapkan Rp325 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis

JOGJA—Pemerintah daerah di seluruh DIY sudah mengalokasikan dana untuk program Makan Bergizi Gratis yang rencananya dimulai Januari 2025.

Yosef Leon, Anisatul Umah, & Alfi Annissatul Karin
redaksi@harianjogja.com

- ▶ BGN menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi.
- ▶ Program MBG membuat Pemkot Jogja harus melakukan *refocusing* anggaran.

Setidaknya dana Rp325 miliar dianggarkan untuk program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Jumlah itu masih bisa berubah karena ada daerah yang belum mengalokasikan.

Kabupaten Sleman berencana mengalokasikan dana paling besar yakni Rp115 miliar untuk MBG. Kemudian Pemkot Jogja sebesar Rp90 miliar, Pemkab Bantul Rp52,7 miliar, Pemda DIY Rp42 miliar, serta Pemkab Gunungkidul Rp26 miliar. Adapun, Pemkab Kulonprogo saat ini tengah melakukan *refocusing* anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk keperluan program MBG tersebut.

DIY Siapkan...

Sekda DIY Beny Suharsono, menjelaskan Pemda DIY mengalokasikan anggaran sebesar 2% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program makan bergizi gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayahnya pada 2025. Dengan perhitungan matematis kasar, DIY akan menyilapkan dana sebesar Rp42 miliar. Namun, angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Anggaran ini sifatnya masih perkiraan. Bisa saja naik atau turun tergantung dari jumlah siswa dan kebutuhan lainnya. Yang pasti, kami sudah berkomitmen untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk program ini," kata Beny Suharsono, Selasa (3/12).

Beny menyampaikan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis akan berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota di DIY. Kabupaten/kota dengan jumlah murid yang lebih banyak, seperti Kota Jogja dan Sleman, diperkirakan akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. "Kami akan terus mengingatkan kepada kabupaten/kota agar menyilapkan anggaran yang sesuai. Jumlah murid menjadi salah satu faktor penentu besarnya anggaran yang dibutuhkan," kata Beny.

Mengenai mekanisme pelaksanaan program ini, Beny mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat yang menentukan apakah program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau ada pembagian peran dengan Pusat. "Kami akan menyesuaikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Yang jelas, kami siap untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya," ujar Beny.

Untuk memudahkan pengelolaan dana, Pemda DIY akan menempatkan dana program Makan Bergizi Gratis di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Dengan demikian, proses penyaluran dana kepada sekolah-sekolah dapat dilakukan secara lebih efisien.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, tengah menyiapkan kebijakan sembari menunggu adanya instruksi lanjutan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan dari Pusat soal MBG. "Kami akan menyesuaikan sesuai dengan jalannya waktu, tapi *policy* dari Pak RI 1, Presiden Prabowo, Kami selalu siap kapan pun implementasi itu betul-betul akan dioperasionalkan," ujar Sugeng.

Adanya program MBG membuat Pemkot Jogja harus melakukan

refocusing anggaran. Saat ditanya soal anggaran apa saja yang akan dikurangi untuk mendukung program MBG, Sugeng mengaku tak hafal secara rinci. Namun, yang jelas dia memastikan anggaran yang akan dikurangi bukan dalam hal yang krusial dan urgen. Penghematan akan dilakukan pada aspek yang memang bisa dieliminir. "Semua SKPD ini kami minta untuk dipikirkan apa yang bisa dilakukan untuk *refocusing*, penghematan. Karena mau enggak mau kalau sudah jadi program-program pemerintah kita harus mengapresiasi," jelasnya.

Sugeng menyebut ada semacam kesepakatan dengan lembaga legislatif berkaitan dengan *refocusing* anggaran. Dia memastikan *refocusing* anggaran tak akan mengganggu aspek pendidikan dan infrastruktur. Sebab, keduanya merupakan aspek yang sangat penting. Di sisi lain, Sugeng juga memastikan *refocusing* anggaran tak akan mengganggu dana operasional penanganan sampah. "[Alokasi anggaran sampah] Ditambah, artinya masih pada posisi sampah aman. Harapannya *refocusing* pun tidak mengganggu rutinitas, tidak mengganggu hak masyarakat, tapi memang ada mencusuar-mencusuar kegiatan yang awalnya memang terkondisi, tapi ini terpaksa dihilangkan terutama yang sifatnya sporadis, tidak rutin, dan tidak *long term*," ungkapnya.

Sewa Dapur

Adapun, DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) DIY menyebut sampai saat ini belum ada *Memorandum of Understanding* (MoU) apapun berkaitan dengan program MBG.

Ketua DPD PPJI DIY, Sri Wahyuni Dewi, mengatakan sebelumnya sempat diminta untuk kerja sama sewa dapur.

Menurutnya hanya ada 14 dapur dari anggota PPJI yang mengajukan diri dan menyatakan bersedia untuk disewa. Kemungkinan masih ada lagi yang dari luar anggota.

Ia mengatakan per dapur rencananya menyilapkan 3.000 porsi MBG. Ada kemungkinan juga sumber daya manusia (SDM) disewa, tetapi ini tergantung dari pemilik, apakah berkenan atau tidak. "Sampai saat ini belum ada regulasi apapun, kami hanya mengajukan dapurnya boleh disewa," ucapnya, Selasa.

PPJI DIY berharap bisa langsung diberikan proyek saja. Surat keputusan (SK) akan memudahkan perencanaan. Anggaran Rp10.000 per porsi menurutnya masih bisa memberinya keuntungan meski tipis.

Dewi mengatakan sejauh ini PPJI selalu dilibatkan dalam pembagian program MBG. Sudah banyak pihak yang menghubungi dan survei langsung ke dapur, tetapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai regulasinya. Dia mengatakan ada sedikit kekecewaan karena hanya dapur yang akan disewa. Sebab menurutnya membuat 3.000 porsi per dapur bukan hal yang mudah. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut akan memperkerjakan UMRM, hingga PKK. Dewi mengatakan dapurnya beberapa kali dikunjungi untuk survei.

Lisa Utami, pemilik salah satu katering di Bantul, Masakan Mami, mengatakan sampai saat ini belum ada yang menawarkan kerja sama MBG. Menurutnya anggaran Rp10.000 per porsi masih biasa disilakati. "Saya sudah biasa juga dapat orderan nasi Rp10.000-an, sudah dapat ayam dan lauk," jelasnya.

Hasil Uji Coba

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat. "Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran, untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (*at cost*), tidak untuk makanan matang. "Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar *at cost*," ujar Dadan.

BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan mengemukakan dana untuk MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal. "Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku *at cost*," kata Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun. Uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa. *(Antara)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005